

Opini Audit, Dana Perimbangan, Kondisi Keuangan dan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Errina Aprilia Putri¹

Sri Rahayu²

Tri Utami Lestari³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Indonesia

*Correspondences: errinaputri7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, terutama pada website resmi yang dimiliki. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder laporan keuangan 34 pemerintah provinsi Indonesia periode 2019-2020 sebanyak 68 sampel. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan spss 26. Hasil penelitian menunjukkan opini audit dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Opini Audit; Dana Perimbangan; Kondisi Keuangan; Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Audit Opinion, Balancing Fund, Financial Condition and Disclosure of Local Government Financial Information

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of audit opinions, balancing funds, and financial conditions on the disclosure of local government financial information, especially on the official website owned. This research is a quantitative study that uses secondary data from the financial statements of 34 Indonesian provincial governments for the 2019-2020 period as many as 68 samples. The analysis in this study used logistic regression analysis with SPSS 26. The results showed that audit opinion and financial condition had no effect on the disclosure of local government financial information. Balancing funds have a negative effect on the disclosure of local government financial information.

Keywords: *Audit Opinion; Intergovernmental Revenue; Financial Condition; Disclosure of Local Government Financial Information*

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 8
Denpasar, 26 Agustus 2022
Hal. 2132-2141

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i08.p13

PENGUTIPAN:

Putri, E. A., Rahayu, S & Lestari, T.U. (2022). Opini Audit, Dana Perimbangan, Kondisi Keuangan dan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2132-2141

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
11 Juli 2022
Artikel Diterima:
22 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Pengungkapan atau *disclosure* menurut Suwardjono (2014) langkah atau tahap akhir dalam proses akuntansi berupa penyajian informasi yang relevan dan berbentuk laporan keuangan atau *statement* keuangan. Pengungkapan informasi keuangan ditujukan kepada pemegang kepentingan seperti pemerintah, kreditor, investor, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terkait (Suwardjono, 2014:578). Pasal 391 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, tercantum bahwa wajib bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi terkait pemerintahan daerah terutama informasi keuangan daerah dan informasi pembangunan daerah. Ketersediaan informasi terkait laporan keuangan bertujuan untuk kepentingan transparansi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur.

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menguji pengaruh dari opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Pengungkapan informasi keuangan ditujukan kepada pemegang kepentingan seperti pemerintah, pihak kreditor atau investor serta pihak lain yang memiliki kepentingan terkait (Suwardjono, 2014:578). Nurhidayati (2020) mengungkapkan pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara rinci dalam laporan keuangan ataupun catatan lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan dalam pemerintahan kepada publik dapat disimpulkan cukup penting baik untuk pemerintah itu sendiri, masyarakat, investor, maupun donatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis bagi penelitian selanjutnya serta manfaat praktis bagi pemerintah dan publik atau masyarakat untuk mengetahui pentingnya pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Peneliti telah melakukan observasi pada pemerintah provinsi di Indonesia sejumlah 34, sementara peneliti menemukan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia khususnya tahun 2019-2020 hampir secara keseluruhan telah memiliki opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, masih terdapat pemerintah provinsi yang tidak secara transparansi melakukan atau melaksanakan pengungkapan informasi keuangan daerahnya pada laman resmi. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan hanya 14 atau sekitar 42% pemerintah provinsi yang melaksanakan pengungkapan informasi keuangan daerahnya di laman resmi dan secara rutin. Pada penelitian ini faktor yang digunakan adalah opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan. Masih ditemukannya research gap atau perbedaan hasil penelitian antar satu peneliti dengan peneliti lain terkait faktor penelitian terhadap variabel dependen.

Penelitian terkait opini audit terhadap pengungkapan informasi keuangan pada pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Adiputra *et al.*, (2018) dengan hasil opini audit yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah berpengaruh pada transparansi pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dengan pendapat apabila opini yang diperoleh pemerintah daerah semakin baik, maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah sehingga terbuka untuk transparansi. Tetapi hasil penelitian oleh Lesmanawati (2019), Nurhidayati (2020) menunjukkan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah tidak berpengaruh pada transparansi pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah di laman resmi yang dimiliki.

Penelitian terkait , dana perimbangan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Lesmanawati (2019) dengan hasil bahwa, dana perimbangan berpengaruh terhadap transparansi pengungkapan informasi keuangan yang ada di pemerintah daerah. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Kurniawan (2018), Jessica & Suhartono (2020) menunjukkan , dana perimbangan tidak berpengaruh pada transparansi pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah pada laman resmi.

Penelitian terkait Kondisi keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilakukan oleh Khasanah, *et al*, (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian dari Nurhidayati (2020) bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh pada pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Teori keagenan menjelaskan mengenai principal dan agent, dalam hal ini pemerintah sebagai agen serta principal merupakan masyarakat atau publik. Hal ini menjadi acuan untuk agen atau pemerintah memberikan informasi kepada principal atau masyarakat dan publik agar tidak terjadi asimetri informasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengungkapkan bahwa opini audit yaitu kesimpulan dari pemeriksaan pada tingkat kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Pemerintah Daerah yang menerima opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara tidak langsung terdorong untuk melaksanakan pengungkapan informasi keuangannya kepada masyarakat atau publik, sehingga dapat memikat pihak investor serta mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan keuangan daerah yang bersangkutan. Disimpulkan bahwa semakin baik tingkatan opini audit yang diterima semakin baik pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nor *et al.*, (2019) , Adiputra *et al.*, (2018), Murni *et al.*, (2017), Khasanah (2017) , Jessica & Suhartono (2020) bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

H₁ : Opini Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN yang diberikan dari pemerintah pusat untuk pendanaan kebutuhan daerah. Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, mewajibkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan laporan terkait informasi keuangannya yang dapat dilakukan melalui SIKD atau sistem informasi keuangan daerah. Sesuai pada kewajiban daerah untuk memberikan informasi keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Pusat. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lesmanawati (2019), dan Gusnaini *et al.*, (2020) Dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Menurut (Lesmanawati, 2019) hal tersebut dikarenakan pengungkapan laporan keuangan secara online menjadi interpretasi dari tanggung jawab pemerintah yang menjadi agen dalam memberikan informasi terkait laporan

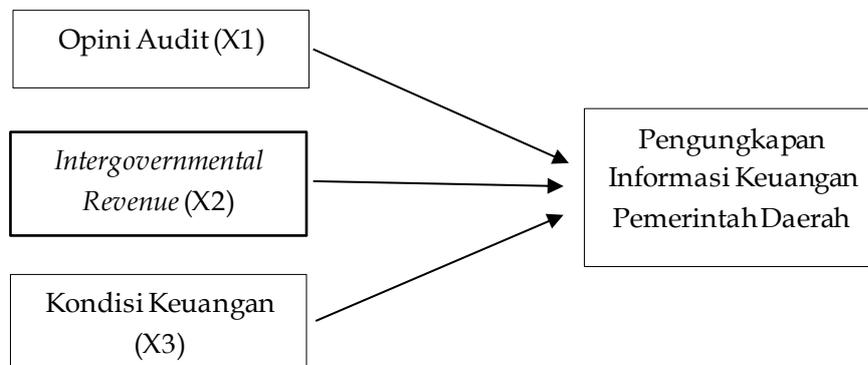
keuangan, kepada masyarakat yang menjadi prinsipal dengan tujuan memudahkan akses penyampaian informasi.

H₂ : Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Kondisi keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan dalam pemerintahannya yang dapat dilihat dari selisih antara pendapatan serta belanja pada APBD (Khasanah *et al*, 2017). Kondisi Keuangan Daerah yang baik menurut pengukuran yang diungkapkan oleh Khasanah *et al*, (2017) adalah daerah yang memiliki nilai kondisi keuangan lebih dari 0,1. Apabila kondisi keuangan suatu daerah tinggi akan berdampak pada peningkatan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Khasanah *et al*, (2017), Rahim & Martani (2016) mengungkapkan bahwa semakin tingginya kondisi keuangan pada suatu daerah akan mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan terutama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada publik, serta dapat dilakukan melalui laman resmi atau website pemerintah daerah yang bersangkutan.

H₃ : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sebanyak 34 pemerintah provinsi di Indonesia digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, atau keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari laporan keuangan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dari tahun 2019-2020 melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) <https://djpk.kemenkeu.go.id/> . Dihasilkan sebanyak 68 data dari 34 Pemerintah Provinsi selama 2019-2020.

Opini audit berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengungkapkan bahwa opini audit yaitu kesimpulan dari pemeriksaan terkait tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini

aduidt diukur dengan Menggunakan variabel *dummy*, dengan pemberian 1 untuk opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) & 0 untuk opini selain WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Dana perimbangan Menurut Undang - Undang No 33 Tahun 2004 merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN yang diberikan dari pemerintah pusat untuk pendanaan kebutuhan daerah. Dana perimbangan diukur dengan total dana perimbangan dibagi total pendapatan.

$$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \dots\dots\dots (1)$$

Kondisi keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan dalam pemerintahannya yang dapat dilihat dari selisih antara pendapatan serta belanja pada APBD (Khasanah *et al.*, 2017). Kondisi keuangan dikur dengan Total pendapatan - Total Belanja : Total Belanja.

$$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja}}{\text{Total Belanja}} \dots\dots\dots (2)$$

Tercantum pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003, bahwa setiap kepala pemerintahan berkewajiban untuk melakukan penyusunan dan pelaporan laporan keuangan atas instansi yang dipimpinya dan laporan tersebut akan diperiksa oleh BPK. Pengukurannya menggunakan variabel *dummy*, dengan pemberian nilai 1 untuk terdapatnya satu atau lebih komponen dari LKPD & nilai 0 untuk tidak terdapat sama sekali komponen dari LKPD

Analisis regresi logistik digunakan pada penelitian ini, hal ini berdasar pada variabel dependen yang menggunakan variabel *dummy* yaitu pemberian nilai 0 dan 1. Asumsi Normalitas data untuk variabel independen dalam analisis regresi logistik tidak dibutuhkan. Persamaan analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta X_1 + BX_2 + \beta X_3 + e \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- $\text{Ln} \frac{P}{1-P}$ = Pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah
- $\text{Ln} \frac{P}{1-P} = 1$ =Pemerintah Provinsi di Indonesia yang melaksanakan pengungkapan informasi keuangan
- $\text{Ln} \frac{P}{1-P} = 0$ =Pemerintah Provinsi di Indonesia tidak melaksanakan pengungkapan informasi keuangan
- X_1 = Opini Audit
- X_2 = Dana perimbangan
- X_3 = Kondisi Keuangan
- β = Koefisien Regresi
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian terdiri atas 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sumber yang dibutuhkan pada penelitian ini berasal dari data sekunder pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta *website* dari masing-masing pemerintah provinsi selama tahun 2019-2020. Hasil Pengujian statistik deskriptif pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| Opini Audit | 68 | 0 | 1 | 0,99 | 0,121 |
| Dana perimbangan | 68 | 0,234 | 0,957 | 0,636 | 0,163 |
| Kondisi Keuangan | 68 | -0,206 | 0,223 | -0,005 | 0,064 |
| Pengungkapan | 68 | 0 | 1 | 0,51 | 0,503 |
| Informasi Keuangan | | | | | |
| Valid N (listwise) | 68 | | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Mean dari opini audit 0.99 serta standar deviasi 0.121 menunjukkan standar deviasi lebih besar dibandingkan mean yang berarti standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, hal ini menunjukkan data bervariasi atau heterogen. Variabel ini menggunakan dummy dimana nilai 1 untuk daerah yang memiliki opini audit WTP, sedangkan nilai 0 untuk daerah yang memiliki opini audit selain WTP.

Mean dana perimbangan 0,636 dan nilai standar deviasi 0,163. Ditujukan bahwa standar deviasi lebih kecil mean, menunjukkan bahwa standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata sehingga data tersebut tidak bervariasi atau homogen.

Kondisi keuangan yang memiliki mean -0,005 dan nilai standar deviasi 0,064. Ditujukan bahwa standar deviasi lebih besar dari mean yang berarti adanya ketimpangan atau fluktuasi data kondisi keuangan selama periode pengamatan yaitu 2019-2020.

Penelitian ini memiliki variabel dependen yang berupa pengungkapan informasi keuangan. Variabel ini memiliki mean 0,51 dan nilai standar deviasi 0,503, menunjukkan standar deviasi lebih kecil yang berarti data tidak bervariasi. Variabel dependen memiliki nilai maksimum 1 serta nilai maksimum 0. Nilai 1 diberikan pada daerah yang melaksanakan pengungkapan informasi keuangan, nilai 0 diberikan pada daerah yang tidak melaksanakan pengungkapan informasi keuangan.

Tabel 3. Uji Kelayakan Regresi Logistik

| Step | Chi-square | df | Sig. |
|------|------------|----|-------|
| 1 | 9,073 | 8 | 0,336 |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengujian kelayakan regresi logistik dengan sig. di angka 0,336. Menunjukkan bahwa nilai sig. yang dihasilkan dalam pengujian ini lebih dari 0,05 sehingga penggunaan model penelitian dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya dan diterima, dengan adanya kesesuaian pada data observasi.

Tabel 4. Uji Model Fit

| | |
|---------------------------------|--------|
| -2LogL Awal (Block Number = 0) | 94,209 |
| -2LogL Akhir (Block Number = 1) | 71,973 |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 5. Uji Simultan

| Step 1 | | Chi-square | df | Sig. |
|--------|-------|------------|----|-------|
| | Step | 22,237 | 3 | 0,000 |
| | Block | 22,237 | 3 | 0,000 |
| | Model | 22,237 | 3 | 0,000 |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil dari Tabel 4 menunjukkan nilai -2LogL pada langkah awal 0 sebesar 94,209, dan pada -2LogL pada langkah akhir sebesar 71.973. Hasil tersebut

menunjukkan adanya penurunan -2LogL awal ke -2LogL akhir sebesar 22.236. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa model regresi semakin baik serta layak untuk dilanjutkan pada analisis berikutnya.

Hasil dari uji simultan dapat dilihat melalui Tabel 5 yang menunjukkan hasil uji regresi logistik untuk pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai dari *Chi-Square* 22.237 dengan tingkat sig. 0,000. Diketahui secara simultan variabel independen yaitu opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 71,973 ^a | 0,279 | 0,372 |

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pengujian koefisien determinasi dengan *model summary* akan menunjukkan hasil dari *Nagelkerke R Square*. Penggunaan koefisien determinasi bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian dengan nilai *Nagelkerke R Square* yang dihasilkan yaitu 0,372 (37,2%) dimana menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel independen yaitu opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan terhadap variabel dependen yang berupa pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah sebesar 37,2% dan sisanya 62,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 7. Uji Parsial

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|----------------|------------------|---------|------------|--------|----|-------|--------|
| Step | Opini Audit | 21,909 | 40.192,986 | 0,000 | 1 | 1,000 | 4,507 |
| 1 ^a | Dana perimbangan | -8,532 | 2,306 | 13,686 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| | Kondisi Keuangan | -0,393 | 4,892 | 0,006 | 1 | 0,936 | 0,675 |
| | Constant | -16,308 | 40.192,987 | 0,000 | 1 | 1,000 | 0,000 |

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 7 menunjukkan hasil dari pengujian parsial, untuk variabel opini audit memiliki nilai sig. 1.000 yang berarti nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05, berarti H_1 ditolak bahwa tidak terdapat pengaruh dari opini audit terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nurhidayati (2020), serta Lesmanawati (2019) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, terutama pada *website* resmi.

Dana perimbangan diketahui pada tabel 7 memiliki nilai sig 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi 0,05, berarti H_2 diterima bahwa terdapat pengaruh antara Dana perimbangan terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lesmanawati (2019), dan Gusnaini *et al.*, (2020), yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, terutama pada *website* resmi

Kondisi keuangan berdasarkan tabel 7 memiliki nilai sig. 0,936 atau nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05, berarti H₃ ditolak bahwa tidak ada pengaruh antara kondisi keuangan terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhidayati (2020) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, terutama pada website resmi.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat dibentuk persamaan penelitian sebagai berikut.

$$\ln \frac{P}{1-P} = -16,308 + 21,909(X_1) + -8,532(X_2) + -0,393(X_3) + e \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

$\ln \frac{P}{1-P}$ = Pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah

$\ln \frac{P}{1-P} = 1$ =Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia melaksanakan pengungkapan informasi keuangan

$\ln \frac{P}{1-P} = 0$ =Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia tidak melaksanakan pengungkapan informasi keuangan

X₁ = Opini Audit

X₂ = Dana perimbangan

X₃ = Kondisi Keuangan

Persamaan tersebut dapat diartikan apabila nilai konstanta sebesar -16,308 kemungkinan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengungkapan informasi keuangan terutama melaksanakan pada laman resmi yang dimiliki saat opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan yang bernilai nol (0) atau konstan maka, kemungkinan bagi pemerintah daerah melaksanakan pengungkapan informasi keuangan pada laman resmi pemerintah daerah sebesar -16,308.

Koefisien regresi dari Exp (B) untuk indikator opini audit sebesar positif 21,909. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan satu satuan pada nilai opini audit maka kemungkinan pengungkapan informasi keuangan pada laman resmi pemerintah daerah akan naik sebesar 21,909. Koefisien regresi dari Exp (B) untuk indikator dana perimbangan sebesar negative -8,532. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan satu satuan pada dana perimbangan maka kemungkinan pengungkapan informasi keuangan pada laman resmi pemerintah daerah akan turun sebesar -8,532. Koefisien regresi dari Exp (B) untuk indikator kondisi keuangan sebesar negatif -0,393. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan satu satuan pada nilai kondisi keuangan maka kemungkinan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah pada laman resmi yang dimiliki akan turun sebesar -0,393.

SIMPULAN

Mengetahui pengaruh dari opini audit, dana perimbangan, dan kondisi keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan penelitian ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, maka semakin tinggi

tingkat pengungkapan. Pemerintah daerah yang melaksanakan pengungkapan informasi keuangan daerahnya, selain untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat, juga memberikan informasi kepada masyarakat atas pengelolaan dan penggunaan dana. Opini audit dan kondisi keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan dan kekurangan, seperti beberapa pemerintah daerah tidak secara langsung menyediakan informasi keuangan pada laman resmi pemerintah provinsi yang dimiliki tetapi harus masuk ke website atau laman pembantu dari pemerintah provinsi seperti PPID. Pemerintah provinsi sebaiknya menyajikan data laporan atau informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat atau publik agar mengurangi adanya asimetri informasi dan dapat memberikan informasi terkait penggunaan dana daerah. Bagi masyarakat maupun stakeholder diharapkan dapat lebih memperhatikan atau melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan, seperti pentingnya transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan terkait variabel dan periode penelitian yang kurang lama sehingga peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan atau melakukan penelitian pada variabel lain seperti kekayaan daerah, karakteristik pemerintah daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah yang terdapat di laman resmi yang dimiliki.

REFERENSI

- Gusnaini, N., Andesto, R., & Ermawati, . (2020). The Effect of Regional Government Size, Legislative Size, Number of Population, and Intergovernmental Revenue on The Financial Statements Disclosure. *European Journal of Business and Management Research*, 5(6), 1-4. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.6.651>
- I.M.P Adiputra; S. Utama dan H.Rosieta. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3.
- UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, 39 (2004).
- UUNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara., (2004).
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018). *Akuntansi Keuangan*, 9(021), 14-27.
- Khasanah, I. N., & Yuhertiana, I. (2017). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting (Ifr) Pemerintah. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1-20.
- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh local government wealth , intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di indonesia secara online. *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan*

-
- Akuntansi*, 15(2), 109-116.
- Martani, W. M. R. & D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Murni, A., Rahayu, S., & Zultilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, Dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 94-103.
- Nor, W., Huda, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112-128.
- Nurhidayati, R. P. & S. R. (2020). Determinan Pengungkapan Lkpd Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 87-95. \
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Modus*, 30(1), 54-70.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan* (ketiga). BPFE.